

MIGRASI DATA SPASIAL PADA KKP *desktop* MENUJU KKP
web DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

ARDIYAN SYAMSI
NIM. 11202597

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA

2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kebaruan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. <i>Land Office Computerization (LOC)</i>	12
a. <i>Front Office</i>	12
b. <i>Back Office</i>	13
2. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).....	14
a. KKP <i>Desktop</i>	14
b. KKP <i>web</i>	15
3. Migrasi Data.....	18
a. Data Spasial	19
b. Data Tekstual	19

4. Peta.....	20
a. Peta.....	20
b. Peta Dasar (<i>Base Map</i>).....	20
c. Peta Digital.....	21
5. Rektifikasi (Koreksi Geometrik).....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	31
A. Kondisi Geografis dan Administratif Kota Batu	31
B. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Sumberejo.....	33
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Batu.....	34
BAB V PROSES MIGRASI DATA SPASIAL DARI KKP <i>desktop</i>	
MENUJU KKP <i>web</i>	48
A. Proses Migrasi Data Spasial di Kantor Pertanahan	
Kota Batu	48
1. Tahap I yaitu Persiapan Migrasi	63
2. Tahap II yaitu Proses Migrasi Data	70
3. Tahap III yaitu Rule Migrasi	74
4. Tahap IV yaitu Kontrol Kualitas Data Spasial Pasca Migrasi....	75
5. Tahap V yaitu Analisa Kualitas Data Spasial Pasca Migrasi	81
BAB VI KENDALA YANG DIHADAPI PADA KEGIATAN MIGRASI	
DATA SPASIAL KKP <i>desktop</i> ke KKP <i>web</i>	89
A. Kendala yang dihadapi pada kegiatan migrasi data spasial	89
B. Upaya penanganan kendala yang dihadapi pada kegiatan	
migrasi data spasial	91

BAB VII PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Improve land services is realized by digitizing land services in the form of computerized office desktop-based applications. Application-based computerized land office desktop becomes necessary to develop web-based applications to migrate the data base of land. Therefore, this study aims to determine: 1) the process of migrating the database from KKP desktop towards KKP web and 2) the obstacles encountered in the process of migrating the database from KKP desktop towards KKP web in Land Office Batu.

The research uses descriptive method with qualitative approach. Sources and types of data used is primary data obtained from interviews and field observation and secondary data obtained from the study of documents and related literature. The technique of collecting data through observation, interviews and studies dikumen. Processing techniques and data analysis performed by inventory and data validation, build basemap, download spatial data in the database, classify and data reduction, improvement of spatial data mapping to database KKP web.

The results showed that: 1) the stages of the migration of the database on the KKP desktop into KKP web do some preparatory stages, preparation of migration, data migration process, rule migration, quality control of spatial data post-migration and post-migration analysis of spatial data; 2) the constraints faced by covering parcels registered yet own NIB can not be migrated, plots have long been registered yet NIB can not be migrated, plots shifted position and direction, as well as plot NIB has the same number on the wards.

Keywords: Database, Migration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informatika telah membuka wawasan dan paradigma baru dalam proses penyajian informasi maupun pelayanan kepada masyarakat yang tidak mungkin dihindari sehingga dibutuhkan suatu inovasi dan ide kreatif dalam membangun kepercayaan (*trust building*) kepada masyarakat. Seiring dengan itu, pola pikir dan kebutuhan masyarakat akan segala sesuatu terutama kebutuhan akan informasi dan pelayanan juga semakin meningkat. Kebutuhan informasi pertanahan merupakan salah satu informasi penting yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan sertipikat tanah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disebut (Kementerian ATR/BPN) selaku pemegang kebijakan mengenai bidang agraria/pertanahan.

Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas pokok yang tertuang pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dilaksanakan secara nasional, regional dan sektoral.

Menyelenggarakan urusan Pemerintah secara nasional tercermin dalam tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang bahwa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penyelenggaraan urusan pemerintah secara regional dan sektoral tercermin dalam pasal 7 Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN di daerah maka dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara sektoral salah satunya ialah dengan pelayanan pertanahan melalui Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia.

Pelayanan pertanahan ditujukan pada kepuasan para pihak yang membutuhkan pelayanan yaitu masyarakat (Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009). Oleh sebab itu, pelayanan pertanahan kepada masyarakat dituntut memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Salah satu strategi meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas adalah penggunaan teknologi informasi

yang handal dan memadai agar terwujud pelayanan pertanahan menjadi cepat, mudah dan akurat serta sistem administrasi pertanahan yang lengkap dan rapi.

Penggunaan teknologi informasi yang handal dan memadai diwujudkan dengan digitalisasi pelayanan pertanahan yaitu komputerisasi pelayanan pertanahan. Untuk meningkatkan pelayanan pertanahan yang berkualitas salah satunya dengan melakukan migrasi pelayanan pertanahan secara manual menjadi pelayanan pertanahan secara komputerisasi. Pembangunan komputerisasi pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan dimulai pada tahun 1997 dalam bentuk *Land Office Computerization (LOC)*, kemudian penyebutannya dinamai LOC phase 1. Menurut (Muryono, 2012:18) perkembangan pelaksanaan komputerisasi pelayanan pertanahan dilakukan secara terus menerus salah satunya dengan penyempurnaan prosedur kerja. Pada tahun 1999, LOC dikembangkan menjadi LOC phase 2A dan pada tahun 2004 menjadi LOC phase 2B.

LOC phase 2B dilaksanakan bersamaan dengan dicanangkan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) kemudian dengan perkembangan pelaksanaan pelayanan pertanahan penyebutan LOC phase 2B dirubah menjadi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) berbasis *desktop* dan sistem koneksi komputernya masih *Lokal Area Network (LAN)*. KKP ini masih dilaksanakan oleh beberapa kantor pertanahan saja dan belum keseluruhan kantor pertanahan melaksanakan KKP berbasis *desktop* sehingga masih terdapat pelayanan pertanahan di kantor pertanahan dilakukan secara manual.

Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, BPN RI sebagai institusi pelayanan publik mewujudkan seluruh Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan pertanahan dengan sistem komputerisasi yang pengelolaan basis datanya dapat dikelola di tiap-tiap Kantor Pertanahan. KKP dengan sistem koneksi menggunakan LAN, disebut dengan KKP *desktop*. KKP *desktop* merupakan komputer *client* yang digunakan untuk memproses berkas pelayanan pertanahan yang dihubungkan dengan *server* sebagai penyimpan basis data pertanahan yang terletak di masing-masing Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

Basis data pertanahan meliputi data spasial dan data tekstual, dimana data tekstual dan merupakan data yuridis tentang riwayat kepemilikan bidang tanah dan data spasial merupakan data obyek hak berupa peta bidang tanah. Tujuan utama dilaksanakannya pembangunan KKP adalah memberikan pelayanan pertanahan pendaftaran tanah lebih cepat, mudah, dan akurat, serta dapat melakukan pemeliharaan data tekstual maupun spasial dengan baik sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring pelayanan pertanahan.

Perkembangan teknologi informasi geospasial mendorong KKP untuk menyusun data spasial pertanahan yang terintegrasi dan terstandar dalam suatu sistem peta tunggal. Kemajuan teknologi geospasial menjadi sarana pendorong optimalisasi pengukuran dan pemetaan data spasial pertanahan sebagai dasar penyusunan informasi spasial bidang tanah di Indonesia. Mendukung penyusunan basis data spasial pertanahan pada KKP, maka dibangunlah sistem aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan yang dikenal

dengan GeoKKP. Aplikasi pemetaan GeoKKP ini pada dasarnya menekankan inventarisasi dan pembangunan data spasial bidang tanah sampai pemetaannya agar mampu menyajikan informasi setiap bidang tanah yang sudah terdaftar di BPN RI (Pusdatin BPN RI, 2013:27).

Informasi data spasial bidang tanah meliputi informasi letak, posisi, batas, luas, dan atribut bidang tanah. Aplikasi pemetaan GeoKKP digunakan untuk memetakan bidang tanah yang telah bersertipikat/terdaftar ke dalam satu sistem koordinat. Data spasial yang telah terdaftar dan terpetakan pada sistem koordinat TM-3⁰ selanjutnya dihubungkan/disinkronisasikan dengan data tekstual yang berisi informasi bidang tanah yang bersangkutan seperti subyek hak, jenis hak, penggunaan tanah maupun nilai tanahnya. Pelaksanaan aplikasi pemetaan GeoKKP menjadi titik awal bagi transformasi layanan pemetaan data spasial dan terwujudnya inovasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanahan.

Mengingat kegiatan pelayanan pertanahan melalui KKP berbasis *desktop* belum maksimal dalam mendukung keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan sesuai amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka BPN RI melakukan terobosan pengembangan komputerisasi pelayanan pertanahan menjadi KKP yang berbasis *web* selanjutnya disebut *KKPweb*. Oleh karena itu, diperlukan migrasi kegiatan pelayanan pertanahan maupun basis data pertanahan dari *KKP desktop* ke *KKP web*. *KKP web* pada prinsipnya hampir sama dengan *KKP desktop* namun *KKP web* lebih terfokus pada pengembangan basis

data/server yang dikelola di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dengan mengandalkan jaringan internet dalam pengaksesannya. Pengelolaan basis data yang tunggal, memudahkan BPN RI untuk memantau kegiatan pelayanan pertanahan di tiap-tiap kantor pertanahan kabupaten/kota kapan saja bila sewaktu-waktu membutuhkan.

Pentingnya informasi pertanahan pada KKP *web*, maka dibutuhkan basis data pertanahan yang valid, dalam arti informasi basis data pertanahan yang telah dibangun baik data tekstual maupun data spasial harus dijamin kebenarannya dan bisa memberikan informasi pertanahan yang terbaru/*update* dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mengarahkan pada pelayanan pertanahan secara *paperless* terutama pada kegiatan pendaftaran tanah. Pemanfaatan teknologi melalui kegiatan KKP *web* sangat memberikan keuntungan dalam setiap kegiatan di bidang pertanahan khususnya bidang tanah yang telah terdaftar dapat diketahui subjek, objek, jenis hak, letak, posisi dan luasnya sehingga dapat tersaji secara lebih cepat, mudah serta dapat diakses oleh khalayak umum pada peta pendaftaran online di *website* BPN RI.

Pada bulan Januari 2010 Kantor Pertanahan Kota Batu telah melaksanakan Komputerasi Kantor Pertanahan (KKP) yang berbasis *desktop* dengan membangun basis data tekstual maupun data spasial. Pembangunan basis data spasial pada KKP *desktop* menggunakan referensi peta citra pemberian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Seiring dengan peningkatan pelayanan pertanahan, awal bulan Januari 2014 Kantor Pertanahan Kota Batu melakukan migrasi pelayanan pertanahan dan basis data

dari KKP *desktop* ke KKP *web*. Kegiatan migrasi basis data dari KKP *desktop* ke KKP *web* diperlukan sinkronisasi data tekstual dan data spasial agar menghasilkan basis data yang valid. Dalam proses migrasi basis data tekstual dan data spasial ke KKP *web* terdapat permasalahan pada basis data spasial yang mengakibatkan adanya data spasial yang belum valid maupun yang sudah valid. Data spasial pada KKP *web* yang belum valid seperti bidang tanah yang posisi tidak sebenarnya, arah/azimuth yang kurang tepat dan hilangnya data spasial pada basis data.

Berdasarkan uraian di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Migrasi data spasial pada KKP *desktop* menuju KKP *web* di Kantor Pertanahan Kota Batu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana proses migrasi data spasial dari KKP *desktop* menuju KKP *web*?
2. apa saja kendala yang dihadapi pada proses migrasi data spasial dari KKP *desktop* menuju KKP *web*?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada proses migrasi data spasial dari KKP *desktop* menuju KKP *web*. Penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi dalam proses migrasi data spasial pada KKP *desktop* menuju KKP *web* serta bagaimana upaya penanganannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. mengetahui proses migrasi basis data dari KKP *desktop* menuju KKP *web* di Kantor Pertanahan Kota Batu;
- b. mengetahui kendala yang dihadapi pada proses migrasi basis data dari KKP *desktop* menuju KKP *web*.

2) Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. secara teoritis berguna sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan terkait proses migrasi basis data dari KKP *desktop* menuju KKP *web*;

secara praktis berguna sebagai informasi pelayanan pertanahan bagi Kantor Pertanahan Kota Batu dalam hal pembangunan basis data khususnya data spasial pada KKP *web* guna terwujud Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan keterbukaan Informasi publik di bidang pertanahan.

E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan penelitiannya (Yunus, 2010:29). Kebaruan penelitian (*Novelty*) dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian peneliti dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah dengan tema yang hampir sama, selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut ini:

Tabel 1. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

No.	Judul Penelitian	Jenis Penelitian, Tahun	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur	Skripsi, 2013	Rischy Venthly Royani	a. Mengetahui pelaksanaan penyusunan basis data pertanahan melalui kegiatan Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun. b. Mengetahui manfaat kegiatan Geo KKP yang diperoleh Kantor Pertanahan Kota Madiun.	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Geo KKP di Kantor Pertanahan Kota Madiun dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. b. Kegiatan Geo KKP memberikan manfaat yang besar terhadap Kantor Pertanahan Kota Madiun.

Bersambung.....

Lanjutan Tabel 1.

1	2	3	4	5	6	7
2	Mekanisme Pembangunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur)	Skripsi, 2014	Ratna Yusmela Sarie	Untuk mengetahui mekanisme pembangunan basis data pertanahan melalui kegiatan Geo KKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Mekanisme pembangunan basis data pertanahan melalui kegiatan Geo KKP dilakukan dengan beberapa tahapan. Pelaksanaan kegiatan ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan meskipun ada tahapan yang belum sepenuhnya terlaksana seperti validasi data buku tanah dan data surat ukur.
4	Migrasi basis data pada KKP <i>desktop</i> ke KKP <i>web</i> di Kantor Pertanahan Kota Batu.	Skripsi, 2015	Ardiyani Syamsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengetahui proses migrasi basis data dari KKP <i>desktop</i> menuju KKP <i>web</i> di Kantor Pertanahan Kota Batu; b. mengetahui kendala yang dihadapi pada proses migrasi basis data dari KKP <i>desktop</i> menuju KKP <i>web</i>. 	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Migrasi basis data dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu persiapan migrasi, proses migrasi data, rule migrasi, kontrol kualitas data spasial pasca migrasi, dan analisa data spasial pasca migrasi data. b. Kendala yang dihadapi pada kegiatan migrasi basis data dari KKP <i>desktop</i> ke KKP <i>web</i>, yaitu bidang tanah pada IP4T yang sudah memiliki NIB tidak ikut termigrasi sehingga bidang tanah tidak tersimpan pada basis data di KKP <i>web</i>, bidang tanah lama belum memiliki NIB tidak dapat tersimpan sempurna saat migrasi, adanya bidang tanah yang memiliki NIB dan SU sama.

Sumber: Diolah Penulis Bulan Januari Tahun 2015

Persamaan skripsi penelitian yang diteliti oleh peneliti dengan skripsi penelitian terdahulu ialah topik dan tema yang dilakukan sama, mengenai Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) pada kantor pertanahan kabupaten/kota yang menyangkut data tekstual maupun data spasial.

Perbedaan skripsi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan skripsi penelitian sebelumnya ialah pada penelitian yang dilakukan oleh Rischy Venthly Royani (2013) dan Ratna Yusmela Sarie (2014) menekankan pada pelaksanaan kegiatan pada GeoKKP dan mekanisme pembangunan basis data pertanahan melalui kegiatan GeoKKP sedangkan pada penelitian oleh peneliti menekankan pada proses migrasi basis data dari KKP *desktop* menuju KKP *web*.

Penelitian yang dilakukan oleh Adolf Antonius Manurung (2014) menekankan pada pemanfaatan teknologi CORS untuk membantu pemetaan dalam GeoKKP, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana menekankan pada proses migrasi basis data dari KKP *desktop* menuju KKP *web*.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan Migrasi Basis Data di Kantor Pertanahan Kota Batu dilakukan melalui 5 (tiga) tahapan dimulai dengan melakukan persiapan migrasi, proses migrasi data, rule migrasi, kontrol kualitas data spasial pasca migrasi dan analisa kualitas data spasial pasca migrasi. Tahap persiapan migrasi merupakan tahap awal dengan penginstalan aplikasi sekaligus pengaturan TNSManager untuk merubah alamat server dan koneksi *database* dari aplikasi *desktop* (LAN) ke *web* (Cloud/internet). Tahap proses migrasi data merupakan tahap melaksanakan migrasi data-data yang meliputi data master, dokumen pengukuran, dokumen dan data peta. Proses migrasi ini harus berurutan dan tidak boleh acak. Tahap rule migrasi merupakan identifikasi hasil migrasi data serta pembersihan data-data yang tidak sesuai dengan format standar KKP *web*. Tahap kontrol kualitas dan analisa data spasial pasca migrasi merupakan proses membenahan data spasial terkait posisi/letak dan arah yang mengalami pergeseran dengan peta citra sebagai *basemap*.
2. Kendala yang dihadapi pada kegiatan migrasi Data Spasial dari KKP *desktop* ke KKP *web* meliputi bidang tanah IP4T yang sudah memiliki nomor NIB pada KKP *desktop* tidak dapat termigrasi sehingga bidang tanah tersebut hilang atau tidak tersimpan pada basis data di KKP *web*, Bidang tanah atau persil lama yang belum memiliki nomor NIB belum dapat tersimpan sempurna dalam basis

data sehingga data spasial banyak yang hilang pada saat migrasi, bidang tanah IP4T yang terpetakan pada *basemap KKP desktop* mengalami pergeseran posisi dan arah setelah dilakukan kegiatan migrasi *database*, adanya bidang tanah memiliki NIB dan Nomor SU yang sama pada satu kelurahan.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas peta citra dengan merektifikasi ulang semua peta citra agar pemetaan bidang tanah atau persil dapat menghasilkan penempatan posisi atau letak yang akurat dan dapat digunakan sebagai informasi pertanahan.
2. Diperlukan komunikasi yang efektif antara tim support KKP dari Pusdatin dengan admin di Kantor pertanahan agar lebih mudah dalam mencari solusi pada pembangunan dan pemetaan data spasial jika terjadi masalah koordinat maupun posisi bidang tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristiono Nugroho. (2010). Bahan Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. (tidak dipublikasikan), Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lasono. (2014). *Migrasi Data Tekstual dari Microsoft Acces ke Oracle dalam Pembangunan Basis Data Komputerisasi Kantor Pertanahan Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo*. STPN, Yogyakarta.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bhumi Aksara, Jakarta.
- Prahasta, Eddy. (2011). *Tutorial ArcGIS Desktop Untuk Bidang Geodesi & Geomatika*. Penerbit Informatika, Bandung.
- Pusdatin BPN RI, (2010). *Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) & Larasita BPN RI*, Diseminarkan di STPN, Yogyakarta.
- _____. (2010). *Pelatihan Administrator Pengenalan KKP Web*. Badan Pertanahan Nasional. Bogor. Tidak ada halaman
- _____. (2013). *On The Job Pelatihan Pengolahan Citra Satelit Penginderaan Jauh*. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- _____. (2013). *Pelatihan Pengolahan Citra Satelit Penginderaan Jauh*. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- _____. (2013). *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*. Tidak Dipublikasikan. Jakarta.
- Sabari Yunus, Hadi. (2010). *Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sinambela, A. (2008). Sistem Informasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web Pada Jurusan D-3 Ilmu Komputer Sumatera Utara.
- Slamet Muryono, dkk., (2012). *Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang*, Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 7 Tahun 4. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Yogyakarta
- Widya Bhumi. No 22 Tahun 8, Juli 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang materi pengukuran dan pemetaan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

INTERNET

<http://thesis.binus.ac.id/Asli/Bab3/2006-2-01257-IF-Bab%203.pdf>. diakses pada tanggal
04 Februari 2015 pukul 20.35 WIB.

<http://www.aldo-expert.com/writers/pengertian-aplikasi-berbasis-web-dan-desktop.html>
diakses pada tanggal 04 Februari 2015 pukul 21.00 WIB.

<http://informatika.web.id/peta-digital.htm> diakses tanggal 04 Februari 2015 pukul 20.30
WIB